

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692054/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
- 4. Kode/Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 2.280.918.000 (DUA MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.280.918.000
Rp. 2.280.918.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.280.918.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 2.280.918.000

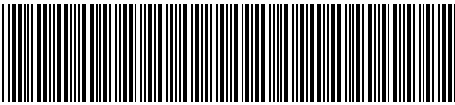
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0661-1998-9326-3551

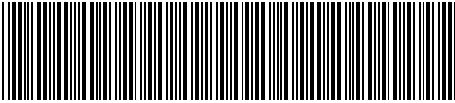
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							2.280.918.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							2.280.918.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya				4,00	layanan	900.219.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				4.00	layanan	900.219.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga				1,00	Perkara	4.920.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah				1.00	Perkara	4.920.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				10,00	Lembaga	1.316.739.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah				10.00	Lembaga	1.316.739.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	59.040.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah				1.00	Laporan	59.040.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0661-1998-9326-3551

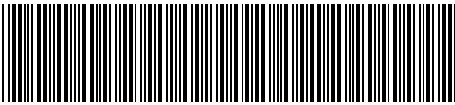
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.280.918.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

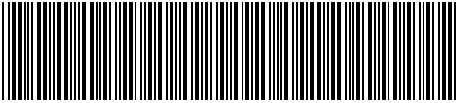


DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	-	2.280.918	-	-	-	2.280.918	12 . 00	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.280.918	-	-	-	2.280.918		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.280.918	-	-	-	2.280.918		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	900.219	-	-	-	900.219		
04	PNBP	-	900.219	-	-	-	900.219		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	4.920	-	-	-	4.920		
04	PNBP	-	4.920	-	-	-	4.920		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	1.316.739	-	-	-	1.316.739		
04	PNBP	-	1.316.739	-	-	-	1.316.739		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	59.040	-	-	-	59.040	12 . 00	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

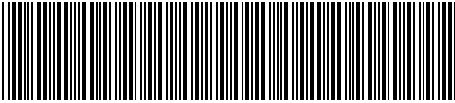
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	59.040	-	-	-	59.040	017@	
JUMLAH		-	2.280.918	-	-	-	2.280.918		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (692054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

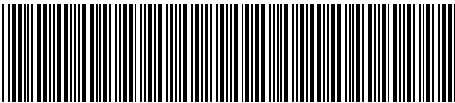
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	125.270	218.568	241.609	311.259	245.369	331.473	178.908	287.511	95.641	89.010	156.300	2.280.918
		BELANJA BARANG	0	125.270	218.568	241.609	311.259	245.369	331.473	178.908	287.511	95.641	89.010	156.300	2.280.918
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	125.270	218.568	241.609	311.259	245.369	331.473	178.908	287.511	95.641	89.010	156.300	2.280.918
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	125.270	218.568	241.609	311.259	245.369	331.473	178.908	287.511	95.641	89.010	156.300	2.280.918

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
IV A. B L O K I R



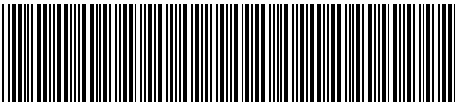
DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692054] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 981.730	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 981.730	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.992
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7110.BCB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.689	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.761
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.425	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 476
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.800	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.673
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 469.700
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.126	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.094	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
IV A. B L O K I R



DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692054] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

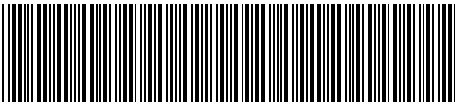
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.941 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.866 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.312 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.419 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.304 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 952 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692054/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0661-1998-9326-3551

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [692054] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO